

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan sekaligus kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Pendidikan merupakan bagian kehidupan manusia, karena pendidikan telah menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung keberhasilan manusia. Prinsip dasar pendidikan adalah sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, baik secara pribadi maupun sebagai model dasar pembangunan bangsa.

Pembangunan pendidikan masih menjadi salah satu fokus dalam pembangunan Indonesia sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peran pendidikan sekolah dapat memberi penguatan disatu sisi, yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan pendidikan di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan, salah satunya dalam penyediaan sarana belajar yang mendidik dan sesuai dengan kebutuhan penduduk (Henlika dkk, 2013).

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana dan prasarana yang cukup penting dalam sebuah perencanaan kawasan. Hal ini mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap elemen masyarakat, sehingga perlunya mementingkan kebutuhan luas lahan akan sarana pendidikan yang sesuai dengan standart yang telah ditentukan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan

bahwa pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan (Gewab dkk, 2015)

Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; dan
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang.

Membuktikan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang berarti bahwa pendidikan itu merupakan Hak Azasi Manusia (HAM). Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal, maka pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang telah diatur dalam bentuk perundang-undangan. Usaha pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Soerjani dkk (1987) mengatakan bahwa tingkat pendidikan sangat menentukan sebagai alat penyampaian informasi kepada manusia tentang perlunya perubahan dan untuk merangsang penerimaan gagasan-gagasan baru. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 mengenai hakekat pembangunan nasional dibidang pendidikan, bahwa pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta memungkinkan

para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah.

Sarana dan prasarana pendidikan baik telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Selain dalam undang-undang No 24 Tahun 2007, kebutuhan fasilitas pendidikan juga dibuat didalam buku Muta'ali tentang teknik analisa regional. Yang mana keduanya memiliki kriteria masing-masing dalam menentukan standar ketersediaan fasilitas pendidikan.

Sejatinya kehidupan yang terus berlanjut akan mengalami pertumbuhan penduduk. Bila terjadi pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan penduduk. Sangat penting sejauh mana kebutuhan-kebutuhan penduduk tersebut dapat dipenuhi dan sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat dicapai. Namun demikian, untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan aktivitas atau kegiatan guna meningkatkan kemampuan seseorang baik individu maupun kelompok agar dapat mengembangkan diri dan berperan sesuai dengan fungsi sosial di lingkungan masyarakat. Sehingga hal diatas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang salah satunya merupakan kebutuhan akan pendidikan. Penyediaan fasilitas pendidikan sangat diperlukan karena diharapkan penyediaan fasilitas tersebut mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Kecamatan Kebayakan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas wilayah 56,34 km². Kepadatan penduduk

sebanyak 273 jiwa/km² persegi dengan penyebaran tidak merata pada setiap desa atau kelurahan (Badan Pusat Statistik 2015). Dengan jumlah penduduk di Kecamatan Kebayakan mencapai 15.685 jiwa maka pemerintah harus menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan yaitu SD, SMP, SMA yang tersebar di berbagai wilayah di Kecamatan Kebayakan yang seluruhnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan ikut berperan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jumlah penduduk di Kecamatan Kebayakan terus mengalami perubahan dari tahun ketahun. Dari pertumbuhan yang terjadi di Kecamatan Kebayakan seharusnya diimbangi dengan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Kebayakan harus disesuaikan dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yaitu pada usia 7-18 tahun.

Ketersediaan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan oleh seluruh daerah di Indonesia termasuk Kecamatan Kebayakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang Analisis Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 dan 2016.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kebutuhan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Kecamatan Kebayakan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu ketersediaan fasilitas pendidikan dilihat dari satuan pendidikan pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA (bangunan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, jumlah murid, jumlah ruangan dan sarana/prasarana), di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan standar fasilitas pendidikan menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2007 dan menurut teori Muta'ali.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendidikan dilihat dari satuan pendidikan pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di Kecamatan Kebayakan sesuai dengan standar Permendiknas No. 24 Tahun 2007?
2. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendidikan dilihat dari satuan pendidikan pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di Kecamatan Kebayakan sesuai dengan teori Muta'ali?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pendidikan dilihat dari satuan pendidikan pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di Kecamatan Kebayakan sesuai dengan standar Permendiknas No. 24 Tahun 2007.

2. Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pendidikan dilihat dari satuan pendidikan pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di Kecamatan Kebayakan sesuai dengan teori Muta'ali.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Bahan informasi bagi pemerintah Kecamatan Kebayakan dalam mengambil keputusan dan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan.
2. Bahan referensi bagi penulis untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
3. Bahan referensi bagi penulis lain dalam mengkaji masalah yang sama pada waktu dan lokasi yang berbeda.